



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com

Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya
Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, S.T
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



ROSITA PUTRI DIANI, SE
NIP. 19940501 201903 2 006

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DR. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	9
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ..	9
2.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	14
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	14
2.1.2.2 Aset/Modal	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	16
2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	19
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga	
Kerja	21
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga	
Kerja	21
2.2.2 Isu Strategis.....	23
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
Tahun 2025 – 2029	24
3.2 Strategi	28
3.3 Arah Kebijakan	32
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
BAB V	
PENUTUP	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16
Tabel 2.3	Capaian indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024	17
Tabel 2.4	Capaian indikator kinerja kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024	18
Tabel 2.5	Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.	20
Tabel 2.6	Permasalahan isu Strategis	23
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	28
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	32
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja	34
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendanaan	52
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	59
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah.....	63
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Nasional.....	64
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	64
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	13
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	24
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	24
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

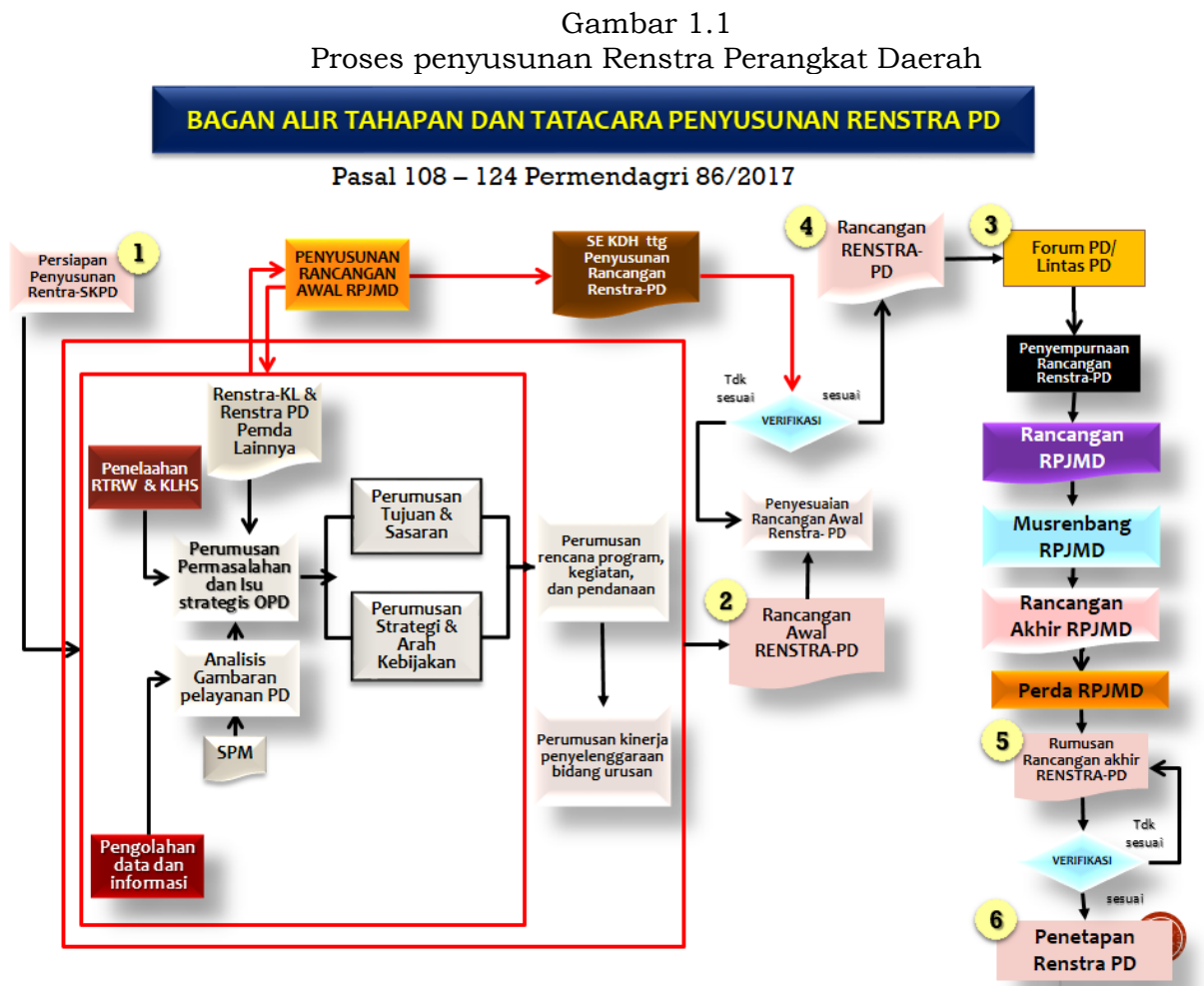
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Perindustrian dan Urusan Ketenagakerjaan. Keberadaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perindustrian dan ketenagakerjaan. Pembangunan di bidang Perindustrian dan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung melalui peningkatan nilai tambah produk, investasi dan inovasi;
- b. Menciptakan lapangan kerja yang berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan produktivitas angkatan kerja melalui Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri;

- d. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah

b. Sumber daya perangkat daerah

c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan beserta unsur pembantu pimpinan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:

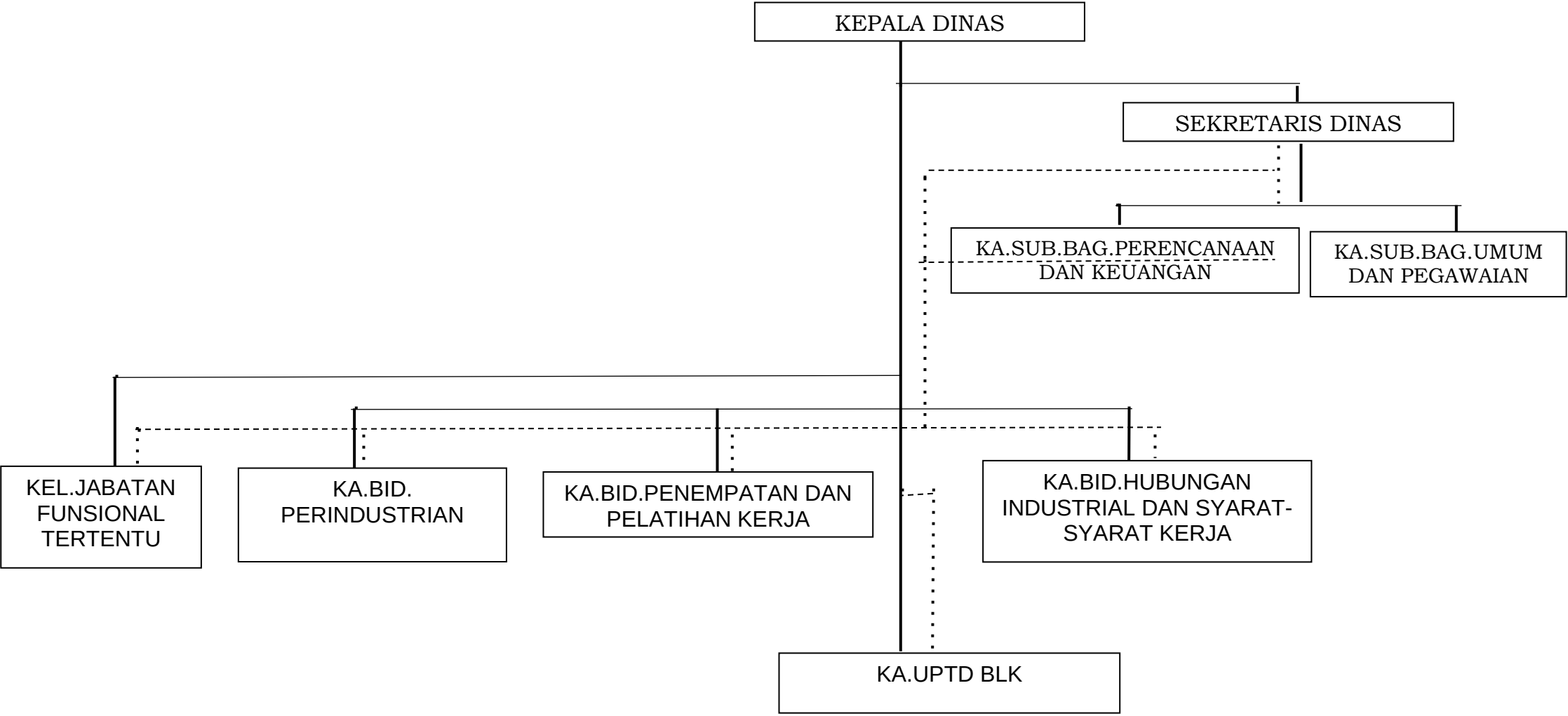
- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha industri;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha industri;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan usaha industri;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi, standarisasi, serta peningkatan sumber daya manusia;
 - e. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama industri;
 - f. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan industri; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja
- Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja melaksanakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan kerja;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring dan pelaporan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja;

- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja
- Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi hubungan industrial, verifikasi syarat kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja melaksanakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang syarat kerja; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Tugas Pokok dan Fungsi UPT BLK
- UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung . Berikut gambar struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								GOLONGAN/ PANGKAT*)						PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLT P	SL TA	D 1	D 2	D 3	S1	S 2	S 3	I	II	III	IV	V	IX	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2																		
KEPALA DINPERINAHER							1					C					1	1
Eselon 3																		
SEKRETARIS							1					B						1
Kabid HI & Syaker						1						A					1	
Kabid Penta							1					A						
Kabid Perindustrian							1					A						
Eselon 4																		
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan							1					A						
Kepala Sub Bagian TU UPTD BLK						1					B							
Pengantar Kerja Muda						2	1				D (1) C (1)	A (1)						
Pengantar Kerja Pertama						2					A (2)							
Penggerak Swadaya Masyarakat Madya						1						A						
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama						2					A (2)							
Penyuluh Perindustrian Muda						1					D							
Penyuluh Perindustrian Ahli Pertama						1					B							

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								GOLONGAN/ PANGKAT*)						PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLT P	SL TA	D 1	D 2	D 3	S1	S 2	S 3	I	II	III	IV	V	IX	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Penyuluh Perindustrian Pelaksana Lanjutan					1						B							
Mediator Muda						1					B							
Mediator Pertama						2					A (2)							
Instruktur Muda						4					D (4)							
Instruktur Pelaksana Lanjutan					6						B (6)							
Instruktur Ahli Pertama						2					A (2)							
Analisis Bahan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja							1					A						
Pengadministrasi Kepegawaian		2								A	A							
Pengadministrasi Pelatihan						1					A							
Pengadministrasi Umum		1								D								
Bendahara		1								D								
Pengadministrasi Keuangan		1								D								
Pranata Komputer Mahir						1					B							
Pengelola Sarana dan Prasarana						1					A							
Verifikator Keuangan					1					C								
Fasilitator Pemerintahan						1					A							
Penata Layanan Operasional (PPPK)						5								5				
Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)		2											2					
JUMLAH	-	7	-	-	8	29	7		-	7	35	9	2	5			2	2
TOTAL PEGAWAI	51								51									

2.1.2.2 Aset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	23.085 m ²	1.893.350.000	Baik
2.	Peralatan dan Mesin	1.445 buah	7.002.788.776	
	a. Alat Besar	3 buah	28.926.250	
	b. Alat Angkutan	36 buah	1.747.079.605	
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	333 buah	1.402.887.664	
	d. Alat Pertanian	24 buah	116.909.863	
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	611 buah	1.360.665.281	
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	104 buah	319.411.734	
	g. Alat Kedokteran dan Keseatan	9 buah	10.720.296	
	h. Alat Laboratorium	32 buah	104.380.044	
	i. Komputer	253 buah	1.823.182.724	
	j. Alat Keselamatan Kerja	35 buah	54.362.712	
	k. Alat Peraga	3 buah	32.367.500	
	l. Peralatan Proses / Produksi	2 buah	1.895.103	
3.	Gedung dan Bangunan	27 buah	13.968.671.093	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian

kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.3
Capaian indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	58,73	74,01	76,14	75,80	78,06	
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	27,46	27,11	26,19	25,92	25,53	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 (58,73%) hingga tahun 2024 (78,06%). Peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 15,28%. Setelah tahun 2021, peningkatan TPAK cenderung melambat namun tetap menunjukkan tren positif. Secara keseluruhan ini mengindikasikan semakin banyak penduduk usia kerja di Kabupaten Temanggung yang aktif dalam pasar kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2021 kemungkinan menjadi faktor utama peningkatan TPAK yang signifikan. Ketika kondisi ekonomi membaik, lebih banyak lapangan kerja tersedia dan masyarakat lebih termotivasi untuk mencari pekerjaan.

b. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi tren penurunan pada Indikator Kontribusi Sektor Industri

terhadap PDRB dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 Kontribusi sektor industri sebesar 27,46% dan terus menurun hingga mencapai 25,53% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi lain di Kabupaten Temanggung (seperti pertanian, perdagangan, atau jasa) relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri.

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, maka capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat sebagaimana tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	58,72	34,78	71,43	72,39	73,78	
2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	n.a	n.a	n.a	n.a	82,35	
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	55,33	78,01	53,61	84,88	40,78	
4	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	n.a	n.a	n.a	n.a	98,77	
5	Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	3,95	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	n.a	n.a	n.a	n.a	100	
7	Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	65,67	61,08	84,89	90,83	88,15	
8	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	21,16	68,91	76,47	81,58	79,67	
9	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	n.a	n.a	n.a	n.a	82,93	
10	Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	92,86	82,35	93,33	100	100	
11	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	n.a	18,46	64,62	70,46	82,19	
12	Persentase Pembinaan IKM tembakau lembut	n.a	2,09	992	12,29	15,47	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran Layanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran Layanan	Keterangan
1.	Layanan Seleksi atau Rekrutmen Tenaga Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
2.	Layanan Smartbilitas	Penyandang Disabilitas	
3.	Layanan Pendaftaran Bursa Kerja Khusus	Pendiri / Pemohon Izin Pendirian BKK	
4.	Layanan Pendaftaran Katur Pencari Kerja AK1	Pencari Kerja	
5.	Layanan Pendaftaran Lowongan Kerja	Perusahaan	
6.	Layanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Pencari Kerja	
7.	Layanan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Calon Pekerja Migran Indonesia	
8.	Layanan Fasilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) / CPMI Bermasalah	Pekerja Migran Indonesia	
9.	Layanan Permohonan Surat Pengantar AK IV AKAD	Pencari Kerja	
10	Layanan Permohonan Surat Pengantar Seleksi Magang Jepang	Masyarakat / Pencari Kerja	
11	Layanan Permohonan Verifikasi Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	LPKS	
12	Layanan Validasi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Perusahaan Pengguna TKA	
13	Layanan Seleksi Pelatihan Keterampilan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
14	Layanan Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
15	Layanan Pelatihan Keterampilan Kerja Kelompok Masyarakat	Masyarakat / Pencari Kerja	
16	Layanan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Pekerja / Perusahaan	
17	Layanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	Perusahaan	
18	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Perusahaan dan Pekerja	
19	Layanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan dan Pekerja	
20	Layanan Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Pekerja	
21	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Pekerja	
22	Layanan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	Pekerja	

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran Layanan	Keterangan
23	Layanan Rekomendasi Merek Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
24	Layanan Konsultasi Sektor Perindustrian	Pelaku Usaha Industri Kecil	
25	Layanan Pendampingan Pendaftaran Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pelaku Usaha Industri Kecil	
26	Layanan Verifikasi Teknis Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Pelaku Usaha Industri Kecil	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Rendahnya keterserapan tenaga kerja di bursa kerja

Pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja dan berhasil ditempatkan dipekerjaan masih rendah. Hal ini disebabkan:

 - a. pencari kerja cenderung memilih-milih pekerjaan dan lokasi pekerjaan sehingga tidak semua lowongan terisi;
 - b. kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pencari kerja, terutama bagi laki-laki usia di atas 30 tahun; dan
 - c. kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini mengindikasikan adanya *mismatch* atau

ketidaksesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan atribut yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi di pasar kerja.

2. Kurangnya jenis dan jumlah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja

Kuantitas program pelatihan yang tersedia tidak mencukupi untuk mengakomodasi jumlah pencari kerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Kondisi ini menciptakan hambatan signifikan bagi pencari kerja untuk memperoleh keterampilan yang relevan dan dibutuhkan. Akibatnya, pencari kerja mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi dan kualifikasinya.

3. Kesejahteraan pekerja rendah dan kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja

Salah satu tolak ukur kesejahteraan pekerja adalah upah. Tidak semua perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum Kabupaten Temanggung. Selain itu tidak semua perusahaan mampu mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

4. Rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah (IKM)

Banyak IKM yang masih bergantung pada proses produksi mentah tanpa inovasi dan branding yang kuat. Rendahnya tingkat hilirisasi menyebabkan produk IKM dari Kabupaten Temanggung kurang kompetitif di pasar nasional dan internasional. Dampaknya Produk industri lokal kurang berkembang, sehingga nilai tambah yang diperoleh oleh pelaku usaha tetap rendah.

5. Kesenjangan Akses Modal dan Teknologi bagi Pelaku IKM

Banyak IKM di Kabupaten Temanggung yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha mereka. Teknologi produksi yang digunakan masih tradisional, sehingga sulit bersaing dengan produk dari daerah lain yang lebih inovatif. Dampak dari

permasalahan ini yaitu rendahnya daya saing IKM di Temanggung dalam persaingan pasar regional dan nasional.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banyaknya penduduk usia kerja yang produktif	Rendahnya keterserapan tenaga kerja di bursa kerja	Diversifikasi ekonomi daerah masih rendah	Peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan	Rendahnya kualitas tenaga kerja
	Kurangnya jenis dan jumlah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja					
	Kesejahteraan pekerja rendah dan kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja					
Pertumbuhan IKM yang fluktuatif	Rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Diversifikasi ekonomi daerah masih rendah	Peningkatan Kontribusi Industri bagi Ekonomi Daerah dengan Dukungan Riset	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Masih banyak IKM yang tradisional Rendahnya daya tahan IKM dalam menghadapi persaingan usaha
	Kesenjangan Akses Modal dan Teknologi bagi Pelaku IKM					

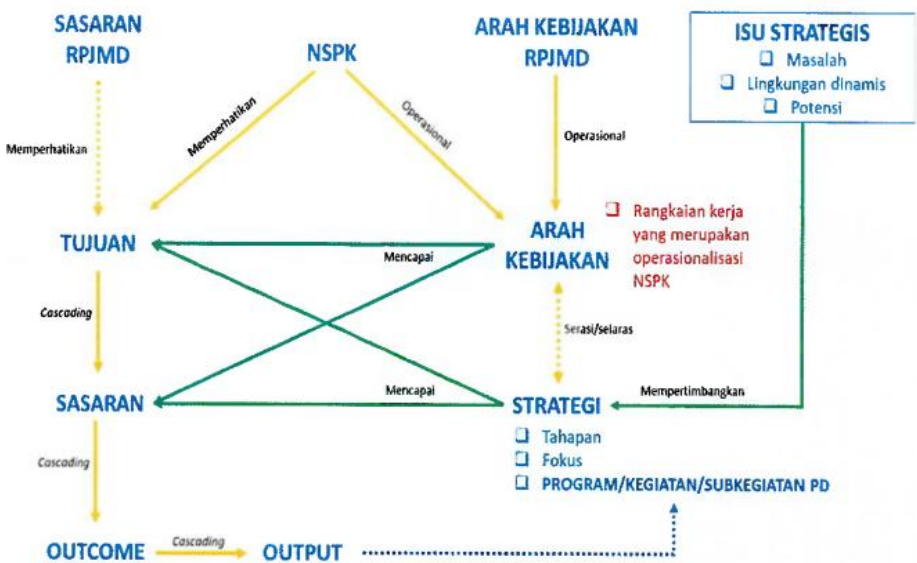
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

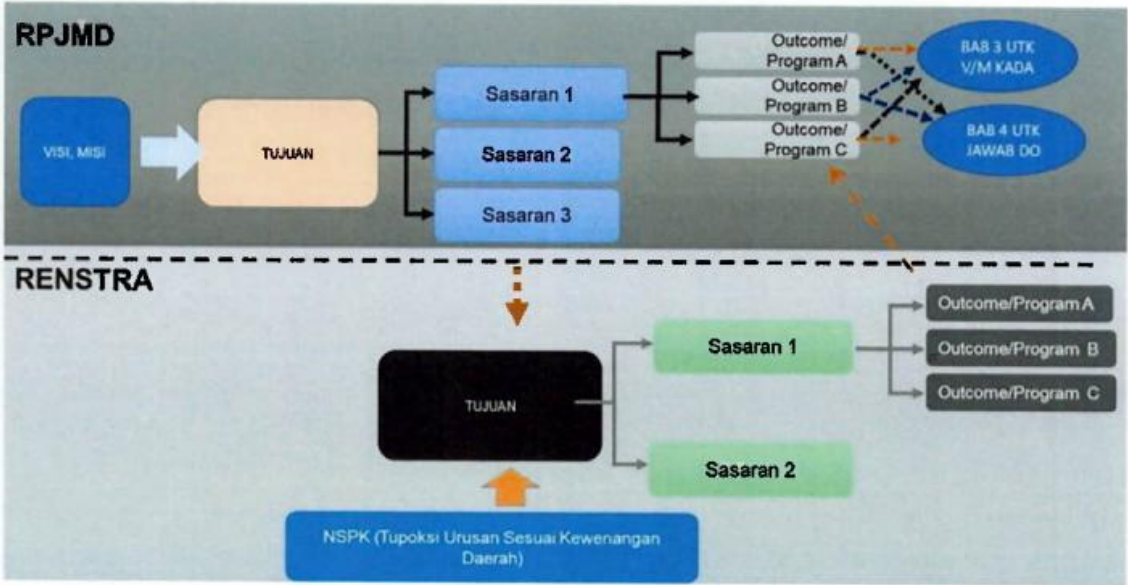
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.31.2.07.3.32.05.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja											
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) (%)	78.06	78.10-78.48	78.42-78.80	78.74-79.12	79.00-79.44	79.32-79.76	79.64-80.00	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	25.53	27.35	27.44	27.80	28.15	28.45	28.50	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	86.70	86.71	86.72	86.73	86.74	86.75	86.76	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72.55	72.8	73	73.2	73.4	73.6	73.8	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	54.78	57.00	60.32	63.45	66.73	70.18	73.81	
		Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)	-	0.38	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	

Ket :

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (2026-2030)

No	Program Prioritas	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Akselerasi transformasi ketenagakerjaan fokus pada percepatan implementasi kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Akselerasi transformasi ketenagakerjaan fokus pada percepatan implementasi kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Ekspansi transformasi ketenagakerjaan menuju ke pasar global	Ekspansi transformasi ketenagakerjaan menuju ke pasar global	Perkuatan ekspansi berfokus pada keberlanjutan program ketenagakerjaan yang telah dijalankan
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pembinaan LPKS - Peningkatan Kerjasama pelatihan dengan LPKS - Peningkatan kompetensi pencari kerja - Penguatan program pelatihan sesuai pasar kerja - Peningkatan kualitas tenaga pengajar	Terwujudnya LPKS telah memenuhi syarat-syarat sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2021 - Peningkatan kompetensi pencari kerja - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan - Penguatan program pelatihan sesuai pasar kerja - Peningkatan kualitas tenaga pengajar	- Peningkatan Kerjasama LPKS dan BLK dengan dunia usaha dan industri - Peningkatan kompetensi pencari kerja - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan - Penguatan program pelatihan sesuai pasar kerja - Peningkatan kualitas tenaga pengajar	- Peningkatan kompetensi pencari kerja - Penguatan program pelatihan sesuai pasar kerja - Peningkatan kualitas tenaga pengajar	- Penguatan program pelatihan sesuai pasar kerja - Peningkatan kompetensi pencari kerja - Peningkatan akses pelatihan bagi kelompok rentan (masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas dan lulusan baru) - Peningkatan kualitas tenaga pengajar

No	Program Prioritas	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Penyusunan profil pencari kerja - Penyusunan database Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI - Penyusunan database tenaga kerja disabilitas	- Peningkatan jejaring kerjasama dengan perusahaan dalam rangka rekrutmen tenaga kerja - Penguatan database CPMI dan PMI - Penyusunan database pencari kerja penyandang disabilitas	- Penyusunan program layanan bagi pencari kerja generasi muda - Penyusunan program layanan bagi pencari kerja penyandang disabilitas - Peningkatan jejaring kerjasama dengan perusahaan dalam layanan disabilitas	Mewujudkan lingkungan ketenagakerjaan yang inklusi bagi disabilitas	Pembentukan public employment service (pelayanan ketenagakerjaan publik)
4	Program Hubungan Industrial	- Pembinaan norma ketenagakerjaan - Pengembangan hubungan industrial	- Pembinaan norma ketenagakerjaan - Penguatan koordinasi LKS Tripartit - Pembinaan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	- Monitoring norma ketenagakerjaan - Monitoring kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	- Evaluasi norma ketenagakerjaan - Evaluasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat

No	Program Prioritas	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Pembinaan industri komoditas unggulan daerah - Pembinaan industri ekonomi kreatif - Perencanaan pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)	- Pendampingan Industri komoditas unggulan daerah - Perizinan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)	- Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) - Pendampingan Industri komoditas unggulan daerah	- Pengembangan Industri komoditas unggulan daerah - Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)	Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	- Penguatan data industry - Verifikasi teknis perizinan usaha sektor industry - Pengawasan perizinan usaha sektor industri	- Verifikasi teknis perizinan usaha sektor industry - Pengawasan perizinan usaha sektor industri	- Verifikasi teknis perizinan usaha sektor industry - Pengawasan perizinan usaha sektor industri	- Verifikasi teknis perizinan usaha sektor industry - Pengawasan perizinan usaha sektor industri	- Verifikasi teknis perizinan usaha sektor industri - Pengawasan perizinan usaha sektor industri
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	- Sosialisasi SIINas - Pendampingan pelaporan industri di SIINas	- Sosialisasi SIINas - Pendampingan pelaporan industri di SIINas	- Sosialisasi SIINas - Pendampingan pelaporan industri di SIINas	- Sosialisasi SIINas - Pendampingan pelaporan industri di SIINas	- Sosialisasi SIINas - Pendampingan pelaporan industri di SIINas

3.3 Arah Kebijakan

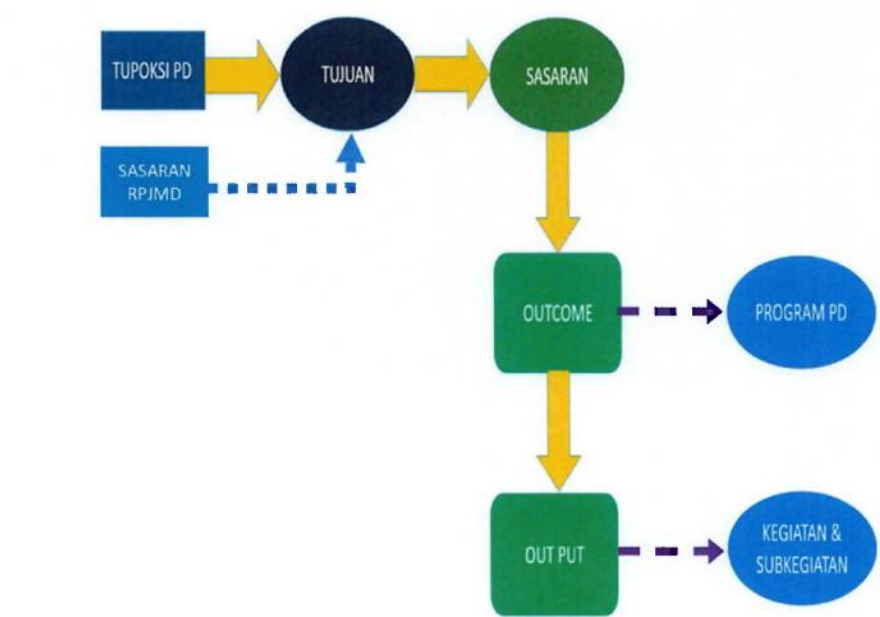
Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian dengan : peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja, tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan, peningkatan produksi perikanan, peningkatan pemajuan kebudayaan, peningkatan investasi, peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)	Penyelenggaraan pelatihan pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	
			Penguatan sarana Hubungan Industrial	
			Sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan UMK, struktur dan skala upah	
			Membangun database pengangguran bekerja sama dengan kominfo melalui aplikasi <i>Smart Village</i>	
			Pemanfaatan BLK untuk pelatihan kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian dengan : peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi, peningkatan nilai usaha perdagangan, peningkatan kinerja koperasi dan UMKM, peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan produksi pertanian.	Penguatan promosi produk IKM unggulan daerah	
			Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) sebagai pusat aglomerasi industri hasil tembakau	
			Pelatihan peningkatan SDM Industri Kecil Menengah (IKM)	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.215.349.928,00		7.271.873.759,00		7.386.309.094,00		7.591.865.026,00		7.650.823.781,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					6.084.099.928,00		6.134.831.884,00		6.233.462.337,00		6.421.386.877,00		6.398.412.161,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian					6.084.099.928,00		6.134.831.884,00		6.233.462.337,00		6.421.386.877,00		6.398.412.161,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-		5.000.000,00		5.069.500,00		5.164.807,00		5.526.343,00	
Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	-	1	1	-	1.05	5.000.000,00	1.1	5.069.500,00	1.15	5.164.807,00	1.2	5.526.343,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					611.000.000,0 0		611.427.700,00		619.926.545,00		631.581.164,00		675.791.846,00	
Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	73.78	72.5 6	50	611.000.000,0 0	54	611.427.700,00	58	619.926.545,00	62	631.581.164,00	66	675.791.846,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina (%)	82.32	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					400.250.000,0 0		400.530.175,00		406.097.544,00		413.732.178,00		442.693.431,00	
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	40.78	36	37	400.250.000,0 0	37.5	400.530.175,00	38	406.097.544,00	38.5	413.732.178,00	39	442.693.431,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan (%)	98.77	31	32		33		34		35		36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan (%)	-	36	37		37.5		38		38.5		39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur (%)	100	92	94		94.5		95		95.5		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	68.52	69.01	69.59		70.17		70.75		71.33		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					120.000.000,00		120.084.000,00		121.753.168,00		120.000.000,00		128.400.000,00	
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan (%)	-	41	42.52	120.000.000,00	42.97	120.084.000,00	43.41	121.753.168,00	43.85	120.000.000,00	44.27	128.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK (%)	79.67	70	75		75		74.40		73.80		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja (%)	82.93	46	47		47		48		49		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					340.000.000,00		340.227.500,00		344.748.162,00		350.947.427,00		352.973.450,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					300.000.000,00		300.210.000,00		304.382.919,00		310.105.318,00		310.322.392,00	
Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah (%)	82.19	78.20	48.27	300.000.000,00	51.55	300.210.000,00	54.83	304.382.919,00	58.11	310.105.318,00	61.39	310.322.392,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri (%)	-	0,2	0.6	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1.4	15.000.000,00	1.8	15.000.000,00	2.2	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		25.842.109,00		27.651.058,00	
Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas (%)	-	1,8	2	25.000.000,00	2.2	25.017.500,00	2.4	25.365.243,00	2.6	25.842.109,00	2.8	27.651.058,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					7.555.349.928 ,00		7.612.101.259, 00		7.731.057.256 ,00		7.942.812.453, 00		8.003.797.231, 00	

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki 8 program yaitu 1 program penunjang urusan pemerintah daerah, 4 program urusan tenaga kerja dan 3 program urusan Perindustrian dengan 15 indikator kinerja program yang menggambarkan target yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan. Pada urusan tenaga kerja terdiri dari 4 program antara lain:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja. Program ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini memiliki *outcome* untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi dan Persentase LPKS yang Dibina.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Program ini memiliki *outcome* untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja yang diukur dengan 5 (lima) indikator program yaitu:
 - 1) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten;
 - 2) Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - 3) Persentase pencari kerja mendapatkan pekerjaan;
 - 4) Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur; dan
 - 5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP).
- d. Program Hubungan Industrial, program ini memiliki *outcome* untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta bermartabat. Program ini diukur dengan 4 (empat) indikator program yaitu :

- 1) Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan;
- 2) Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK;
- 3) Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja; dan
- 4) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.

Untuk bidang urusan Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki 3 (tiga) program antara lain:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program ini memiliki *outcome* untuk meningkatkan kompetensi industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah yang diukur dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Program ini memiliki *outcome* untuk meningkatkan pengendalian perizinan berusaha sektor industri yang diukur dengan indikator kinerja Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Program ini memiliki *outcome* untuk meningkatkan pengelolaan di SIINas yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas.

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.31.2.07.3.32.05.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)		
					Rasio PDRB Industri Pengolahan		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.07.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETE RANG AN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
			Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
					Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
					Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
					Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Terwujudnya Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat		Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terwujudnya penerapan norma ketenagakerjaan pada perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi			Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten		
			Meningkatnya pertumbuhan industri		Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETE RANG AN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri		Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terwujudnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri		Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya informasi industri pada SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Industri Nasional (SIINas)		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa proses perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome (hasil antara), output (hasil akhir), indikator kinerja, hingga unit pelaksana yang bertanggung jawab. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi program memiliki arah yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD yang relevan.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah **“Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, serta Sektor Industri Dalam Pembangunan Ekonomi”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja;
2. Meningkatkan sektor industri dalam pembangunan ekonomi.

Setiap sasaran strategis telah didukung melalui program-program yang relevan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan operasional, serta diperinci ke dalam sub kegiatan yang spesifik dan terukur. Masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan dalam mencapai tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	04	(05)	06	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.215.349.928,00		7.271.873.759,00		7.386.309.094,00		7.591.865.026,00		7.650.823.781,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.084.099.928,00		6.134.831.884,00		6.233.462.337,00		6.421.386.877,00		6.398.412.161,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				6.084.099.928,00		6.134.831.884,00		6.233.462.337,00		6.421.386.877,00		6.398.412.161,00	3.31.2.07.3.32.05.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00		
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.810.830.818 ,00		5.810.830.818 ,00		5.810.830.818, 00		5.979.143.478, 00		5.923.668.762, 00		
Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	4 7	5.810.830.818 ,00	4 7	5.810.830.818 ,00	4 7	5.810.830.818, 00	47	5.979.143.478, 00	4 7	5.923.668.762, 00		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.810.830.818 ,00		5.810.830.818 ,00		5.810.830.818, 00		5.979.143.478, 00		5.923.668.762, 00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	4 7	5.810.830.818 ,00	4 7	5.810.830.818 ,00	4 7	5.810.830.818, 00	47	5.979.143.478, 00	4 7	5.923.668.762, 00		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.028.952,00		105.734.988,0 0		155.365.441,0 0		163.477.321,0 0		170.477.321,0 0		
Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	1 2	85.028.952,00	1 2	105.734.988,0 0	1 2	155.365.441,0 0	12	163.477.321,0 0	1 2	170.477.321,0 0		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	1 2		1 2		1 2		12		1 2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1 2		1 2		1 2		12		1 2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12	1 2		1 2		1 2		12		1 2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	1 2		1 2		1 2		12		1 2			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		10.000.000,00		18.888.120,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1 2	5.000.000,00	1 2	10.000.000,00	1 2	18.888.120,00	12	19.000.000,00	1 2	20.000.000,00		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.639.000,00		20.304.351,00		28.304.351,00		30.304.351,00		32.304.351,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	1 2	15.639.000,00	1 2	20.304.351,00	1 2	28.304.351,00	12	30.304.351,00	1 2	32.304.351,00		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.491.450,00		17.080.870,00		27.080.870,00		28.080.870,00		30.080.870,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	1 2	15.491.450,00	1 2	17.080.870,00	1 2	27.080.870,00	12	28.080.870,00	1 2	30.080.870,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.232.502,00		20.159.100,00		25.159.100,00		25.159.100,00		27.159.100,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	1 2	14.232.502,00	1 2	20.159.100,00	1 2	25.159.100,00	12	25.159.100,00	1 2	27.159.100,00		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.666.000,00		38.190.667,00		55.933.000,00		60.933.000,00		60.933.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1 2	34.666.000,00	1 2	38.190.667,00	1 2	55.933.000,00	12	60.933.000,00	1 2	60.933.000,00		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.355.627,00		104.000.000,0 0		119.000.000,0 0		124.500.000,0 0		140.000.000,0 0		
Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1 2	90.355.627,00	1 2	104.000.000,0 0	1 2	119.000.000,0 0	12	124.500.000,0 0	1 2	140.000.000,0 0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1 2		1 2		1 2		12		1 2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	1 2		1 2		1 2		12		1 2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1 2	1.000.000,00	1 2	2.000.000,00	1 2	3.000.000,00	12	3.500.000,00	1 2	4.000.000,00		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.355.627,00		82.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		91.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1 2	77.355.627,00	1 2	82.000.000,00	1 2	86.000.000,00	12	86.000.000,00	1 2	91.000.000,00		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1 2	12.000.000,00	1 2	20.000.000,00	1 2	30.000.000,00	12	35.000.000,00	1 2	45.000.000,00		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.884.531,00		113.266.078,0 0		147.266.078,0 0		153.266.078,0 0		163.266.078,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 0	96.884.531,00	1 2	113.266.078,0 0	1 4	147.266.078,0 0	16	153.266.078,0 0	1 8	163.266.078,0 0		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	8		9		1 0		10		1 0			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	1 7		1 8		1 9		20		2 1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				76.884.531,00		78.266.078,00		85.266.078,00		85.266.078,00		88.266.078,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	25	1 7	76.884.531,00	1 8	78.266.078,00	1 9	85.266.078,00	20	85.266.078,00	2 1	88.266.078,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		7.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	8	-	9	7.000.000,00	1 0	10.000.000,00	10	10.000.000,00	1 0	10.000.000,00		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		13.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 0	10.000.000,00	1 2	13.000.000,00	1 4	17.000.000,00	16	18.000.000,00	1 8	20.000.000,00		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-		5.000.000,00		5.069.500,00		5.164.807,00		5.526.343,00		
Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	1	-	1 0 5	5.000.000,00	1. 1	5.069.500,00	1. 15	5.164.807,00	1. 2	5.526.343,00	3.31.2.07.3.32.0 5.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				-		5.000.000,00		5.069.500,00		5.164.807,00		5.526.343,00		
Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	-	1	5.000.000,00	1	5.069.500,00		5.164.807,00	1	5.526.343,00		
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				-		5.000.000,00		5.069.500,00		5.164.807,00		5.526.343,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	-	1	5.000.000,00	1	5.069.500,00		5.164.807,00	1	5.526.343,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				611.000.000,0 0		611.427.700,0 0		619.926.545,0 0		631.581.164,0 0		675.791.846,0 0		
Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	82.32	8 2	611.000.000,0 0	8 3	611.427.700,0 0	8 4	619.926.545,0 0	85	631.581.164,0 0	8 6	675.791.846,0 0	3.31.2.07.3.32.0 5.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73.78	5 0		5 4		5 8		62		6 6			
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				600.000.000,0 0		600.420.000,0 0		608.765.838,0 0		620.210.636,0 0		663.625.380,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi pencari kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n	208	1 6 0	600.000.000,0 0	1 6 0	600.420.000,0 0	1 7 6	608.765.838,0 0	17 6	620.210.636,0 0	1 7 6	663.625.380,0 0		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				600.000.000,0 0		600.420.000,0 0		608.765.838,0 0		620.210.636,0 0		663.625.380,0 0		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n	208	1 6 0	600.000.000,0 0	1 6 0	600.420.000,0 0	1 7 6	608.765.838,0 0	17 6	620.210.636,0 0	1 7 6	663.625.380,0 0		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				11.000.000,00		11.007.700,00		11.160.707,00		11.370.528,00		12.166.466,00		
Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	2 0	11.000.000,00	2 1	11.007.700,00	2 2	11.160.707,00	23	11.370.528,00	2 4	12.166.466,00		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				11.000.000,00		11.007.700,00		11.160.707,00		11.370.528,00		12.166.466,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	2 0	11.000.000,00	2 1	11.007.700,00	2 2	11.160.707,00	23	11.370.528,00	2 4	12.166.466,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				400.250.000,0 0		400.530.175,0 0		406.097.544,0 0		413.732.178,0 0		442.693.431,0 0		
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	-	3 7	400.250.000,0 0	3 7 .5	400.530.175,0 0	3 8	406.097.544,0 0	38 .5	413.732.178,0 0	3 9	442.693.431,0 0	3.31.2.07.3.32.0 5.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68.52	6 9 .5 9		7 0 .1 7		7 0. 7 5		71 .3 3		7 2			
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	40.78	3 7		3 7 .5		3 8		38 .5		3 9			
	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	98.77	3 2		3 3		3 4		35		3 6			
	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	100	9 4		9 4 .5		9 5		95 .5		9 6			
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000,0 0		380.280.175,0 0		385.847.544,0 0		386.732.178,0 0		402.193.431,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	64	6 0	380.000.000,0 0	6 0	380.280.175,0 0	6 0	385.847.544,0 0	60	386.732.178,0 0	6 0	402.193.431,0 0		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	2 0 0		2 1 0		2 2 0		23 0		2 4 0			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	7 5 0		7 5 0		75 0		7 5 0					
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-	5		5		5		5					
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				9.000.000,00		9.280.175,00		14.847.544,00		15.732.178,00		25.193.431,00		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	2 0 0	9.000.000,00	2 1 0	9.280.175,00	2 2 0	14.847.544,00	23 0	15.732.178,00	2 4 0	25.193.431,00		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	7 5 0	9.000.000,00	7 5 0	9.000.000,00	7 5 0	9.000.000,00	75 0	9.000.000,00	7 5 0	12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-	5	22.000.000,00	5	22.000.000,00	5	22.000.000,00	5	22.000.000,00	5	25.000.000,00		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				340.000.000,0 0		340.000.000,0 0		340.000.000,0 0		340.000.000,0 0		340.000.000,0 0		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	64	6 0	340.000.000,0 0	6 0	340.000.000,0 0	6 0	340.000.000,0 0	60	340.000.000,0 0	6 0	340.000.000,0 0		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				20.250.000,00		20.250.000,00		20.250.000,00		27.000.000,00		40.500.000,00		
Terwujudnya Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	3	20.250.000,00	3	20.250.000,00	3	20.250.000,00	4	27.000.000,00	4	40.500.000,00		
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan				20.250.000,00		20.250.000,00		20.250.000,00		27.000.000,00		40.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	3	20.250.000,00	3	20.250.000,00	3	20.250.000,00	4	27.000.000,00	4	40.500.000,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				120.000.000,0 0		120.084.000,0 0		121.753.168,0 0		120.000.000,0 0		128.400.000,0 0		
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	79.67	7 5	120.000.000,0 0	7 5	120.084.000,0 0	7 4. 4 0	121.753.168,0 0	73 .8 0	120.000.000,0 0	7 2	128.400.000,0 0	3.31.2.07.3.32.0 5.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100	1 0 0		1 0 0		10 0		1 0 0					
	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	-	4 2 . 5 2		4 2 . 9 7		4 3. 4 1		43 .8 5		4 4. 2 7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	82.93	4 7		4 7		4 8		49		5 0			
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.084.000,00		11.753.168,00		10.000.000,00		18.400.000,00		
Terwujudnya penerapan norma ketenagakerjaan pada perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	1	10.000.000,00	1	10.084.000,00	1	11.753.168,00	1	10.000.000,00	1	18.400.000,00		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				10.000.000,00		10.084.000,00		11.753.168,00		10.000.000,00		18.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	1	10.000.000,00	1	10.084.000,00	1	11.753.168,00	1	10.000.000,00	1	18.400.000,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000,0 0		110.000.000,0 0		110.000.000,0 0		110.000.000,0 0		110.000.000,0 0		
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10	8	110.000.000,0 0	8	110.000.000,0 0	8	110.000.000,0 0	8	110.000.000,0 0	8	110.000.000,0 0		
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	2 0 0 0 0		2 0 1 0 0		2 0 2 0 0	20 30 0		2 0 4 0 0				
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1		1		1		1		1			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	2 0 0 0 0	10.000.000,00	2 0 1 0 0	10.000.000,00	2 0 2 0 0	10.000.000,00	20 30 0	10.000.000,00	2 0 4 0 0	10.000.000,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				340.000.000,0 0		340.227.500,0 0		344.748.162,0 0		350.947.427,0 0		352.973.450,0 0		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				300.000.000,0 0		300.210.000,0 0		304.382.919,0 0		310.105.318,0 0		310.322.392,0 0		
Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	82.19	4 8 . 2 7	300.000.000,0 0	5 1 . 5 5	300.210.000,0 0	5 4. 8 3	304.382.919,0 0	58 .1 1	310.105.318,0 0	6 1. 3 9	310.322.392,0 0	3.31.2.07.3.32.0 5.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				300.000.000,0 0		300.210.000,0 0		304.382.919,0 0		310.105.318,0 0		310.322.392,0 0		
Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	-	1	300.000.000,0 0	1	300.210.000,0 0	1	304.382.919,0 0	1	310.105.318,0 0	1	310.322.392,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1		1		1		1		1			
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.486,00		51.684.220,00		51.720.399,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	50.000.000,00	1	50.035.000,00	1	50.730.486,00	1	51.684.220,00	1	51.720.399,00		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan				230.000.000,0 0		230.175.000,0 0		233.652.433,0 0		238.421.098,0 0		238.601.993,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	1	230.000.000,0 0	1	230.175.000,0 0	1	233.652.433,0 0	1	238.421.098,0 0	1	238.601.993,0 0		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	-	0 6	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1. 4	15.000.000,00	1. 8	15.000.000,00	2. 2	15.000.000,00	3.31.2.07.3.32.0 5.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terwujudnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		25.842.109,00		27.651.058,00		
Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	-	2	25.000.000,00	2 .2	25.017.500,00	2. 4	25.365.243,00	2. 6	25.842.109,00	2. 8	27.651.058,00	3.31.2.07.3.32.05. 0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		25.842.109,00		27.651.058,00		
Tersedianya informasi industri pada SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	1	25.000.000,00	1	25.017.500,00	1	25.365.243,00	1	25.842.109,00	1	27.651.058,00		
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				25.000.000,00		25.017.500,00		25.365.243,00		25.842.109,00		27.651.058,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	0 4	(05)	0 6	(07)	(0 8)	(09)	(1 0)	(11)	(1 2)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	1	25.000.000,00	1	25.017.500,00	1	25.365.243,00	1	25.842.109,00	1	27.651.058,00		

Berdasarkan Tabel 4.3 tentang Rencana Program, Kegiatan/Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, alokasi anggaran menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2026 hingga 2030. Pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 7.215.349.928,00 meningkat bertahap hingga mencapai Rp 7.650.823.781,00 pada tahun 2030. Sementara itu, pada bidang perindustrian, alokasi anggaran sebesar Rp 340.000.000,00 di tahun 2026 juga mengalami kenaikan hingga Rp 352.973.450,00 pada tahun 2030.

Kecenderungan peningkatan anggaran tersebut menggambarkan adanya kebutuhan pembiayaan yang semakin berkembang. Bidang tenaga kerja lebih dominan diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, penyusunan perencanaan, dan dukungan administrasi, sedangkan bidang perindustrian meskipun dengan porsi yang lebih kecil, tetap berperan strategis dalam penguatan industri kecil dan menengah, fasilitasi usaha, serta peningkatan daya saing pelaku industri. Dengan komposisi pendanaan tersebut, arah kebijakan difokuskan pada pemenuhan belanja wajib, penguatan dukungan operasional, dan pengembangan sektor industri produktif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara seimbang.

Tabel 4.4
 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
 Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERA NGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.31.2.07.3.32.05.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				
1.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
2.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
3.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
4.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya pertumbuhan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mengampu 2 (dua) program prioritas Bupati yaitu Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan perikanan.

Program prioritas Peningkatan kualitas kualitas tenaga kerja akan dicapai melalui 2 program aksi. Program aksi pertama, yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua program, yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang mencakup:
 - Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan sub kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
 - Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, yang mencakup:
 - a. Kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 - Pelayanan antar kerja.
 - Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja.

- Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.
- Perluasan kesempatan kerja.
- b. Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja dengan sub kegiatan job fair/bursa kerja.
- c. Kegiatan Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah dengan sub kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon PMI.

Program aksi kedua adalah peningkatan hubungan industrial, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Program yang dijalankan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Program Hubungan Industrial, yang meliputi Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota.

Sedangkan pada program prioritas Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan akan dicapai melalui 1 (satu) program aksi yaitu Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah. Program aksi ini dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui program Perencanaan dan pembangunan industri pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dengan demikian, keseluruhan kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta peningkatan industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah sesuai visi dan misi Bupati.

Perangkat daerah tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan perindustrian dan ketenagakerjaan, serta digunakan sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja setiap tahunnya.

Selanjutnya, indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE RANG AN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.31.2.07.3.32.05.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja									
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	78,06	78.10-78.48	78.42-78.80	78.74-79.12	79.00-79.44	79.32-79.76	79.64-80.00	
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,53	27,35	27,44	27,8	28,15	28,45	28,5	
4.	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	-	0,38	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	86,7	86,71	86,72	86,73	86,74	86,75	86,76	
6.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	54,78	57	60,32	63,45	66,73	70,18	73,81	
7.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	72,8	73	73,2	73,4	73,6	73,8	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025 – 2030 yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Rasio PDRB Industri Pengolahan, Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten, Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Nilai AKIP Perangkat Daerah.

TPAK merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Semakin tinggi TPAK, semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam dunia kerja, yang menunjukkan tingkat produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung. Industri pengolahan mencakup kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti makanan, tekstil, logam, dan lainnya. Rasio ini penting karena sektor industri pengolahan merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran industri pengolahan dalam mendorong perekonomian daerah.

Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten mengukur tingkat pertumbuhan jumlah IKM setiap tahunnya. Pertumbuhan IKM menunjukkan dinamika kewirausahaan, peningkatan kapasitas produksi, serta daya saing ekonomi daerah. Semakin tinggi persentase pertambahan IKM, semakin kuat pula kontribusi sektor usaha

kecil dan menengah terhadap perekonomian lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. IKM menjadi alat evaluasi penting untuk mengukur kualitas pelayanan publik, transparansi, kecepatan, serta ketepatan layanan. Nilai IKM yang semakin meningkat menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan persentase tenaga kerja yang telah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Tingginya angka kepesertaan menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan tenaga kerja serta efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong perusahaan dan pekerja untuk mengikuti program tersebut. Semakin luas cakupannya, semakin terlindungi kesejahteraan dan keamanan para tenaga kerja di Kabupaten Temanggung.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah mencerminkan tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran. Nilai AKIP menjadi tolok ukur sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semakin tinggi nilai AKIP, semakin baik tata kelola pemerintahan daerah dalam mencapai target pembangunan serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	ST AT US	SAT UAN	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET TAHUN						KE TE RA NG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	pos itif	%	-	1	1	1.05	1.1	1.15	1.2	
3.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	pos itif	%	40.78	36	37	37.5	38	38.5	39	
4.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	pos itif	%	21.42	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22	
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		%	34336 42.93	3453 642. 93	3478 642. 93	3508 642. 93	3533 642. 93	3553 642. 93	3578 642. 93	
6.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		%	26.01	26.8 3	27.6 4	28.4 5	29.2 7	30.0 8	30.8 9	
7.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
8.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	pos itif	%	85.53	85.6	85.7	85.8	85.9	86	86.1	
9.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	pos itif	%	0.37	0.38	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	
10.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	pos itif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait		%	1.19	1.2	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	

Berdasarkan Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun 2025–2030, terdapat sebelas indikator kinerja yang terdiri atas lima indikator bidang tenaga kerja dan enam indikator bidang perindustrian.

Pada bidang tenaga kerja, indikator yang digunakan antara lain:

- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana tenaga kerja, dengan target meningkat dari 1,0 pada tahun 2025 menjadi 1,2 pada tahun 2030.
- b. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja, naik dari 36% pada tahun 2025 menjadi 39% pada tahun 2030.
- c. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, meningkat dari 21,5% pada tahun 2025 menjadi 22% pada tahun 2030.
- d. Tingkat produktivitas tenaga kerja, naik dari 3453642,93% pada tahun 2025 menjadi 3578642,93% pada tahun 2030.
- e. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola ketenagakerjaan yang baik, dari 26,83% pada tahun 2025 menjadi 30,89% pada tahun 2030.

Sementara pada bidang perindustrian, indikator yang digunakan adalah:

- a. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK, dari 85,6% pada tahun 2025 menjadi 86,1% pada tahun 2030.
- b. Persentase pertambahan industri kecil dan menengah, sebesar 0,38% pada tahun 2025 dan 0,44 pada tahun 2030.
- c. Tersedianya informasi industri secara online, dengan target 100% setiap tahun.
- d. Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dilakukan oleh instansi, meningkat dari 1,19 pada baseline tahun 2024 menjadi 1,25 pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung program strategis nasional, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, menyusun program yang selaras dengan arah pembangunan daerah terutama pada aspek penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7

Daftar Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penanggulangan kemiskinan								
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000	600.420.000	608.765.838	620.210.636	663.625.380	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	25.000.000	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
2	Pertumbuhan Ekonomi								
	Pengendalian Inflasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	50.035.000	50.730.486	51.684.220	51.720.399	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	230.000.000	230.175.000	233.652.433	238.421.098	238.601.993	

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada aspek penanggulangan kemiskinan, program diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, termasuk dukungan terhadap unit layanan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada pengembangan industri daerah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga menjalankan program prioritas delegasi dari Provinsi Jawa Tengah, yang dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
 Provinsi Jawa Tengah

N o	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	terwujudnya pemuda pemudi usia 16-30 tahun yang terampil dan siap menjadi wirausaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota - Perluasan Kesempatan Kerja	

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mendukung program prioritas provinsi yaitu Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja dengan tujuan untuk mewujudkan pemuda pemudi usia 16 – 30 tahun yang terampil dan siap menjadi wirausaha. Kegiatan tersebut didukung dengan 2 (dua) kegiatan urusan tenaga kerja yaitu:

- a. Pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
- b. Program penempatan tenaga kerja dengan kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/ kota pada sub kegiatan perluasan kesempatan kerja.

Untuk program prioritas nasional, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak mendapatkan delegasi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

Tabel 4.9
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Nasional

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Perindustrian dan tenaga kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perindustrian dan tenaga kerja untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perindustrian dan tenaga kerja dan atau target kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dunia usaha, akademisi, dan

masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

LAMPIRAN

Rencana Tindak Pengendalian Strategis

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYEL ESAIAN
Tujuan : Meningkatnya kualitas tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Risiko Kebijakan: Turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja	RSO.26.07.11.01	16	Turunnya supply tenaga kerja, sedikitnya orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, banyaknya penduduk yang memiliki penghasilan yang layak	Penurunnya produktifitas, peningkatan kemiskinan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi	Promosi investasi industri pengolahan, pelatihan vokasi lokal, kemitraan UMKM besar	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Kepatuhan: Tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan standar keselamatan kerja	RSO.26.07.11.02	16	Kurangnya pengawasan dan sanksi tegas, minimnya pemahaman perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan	Penurunan kesejahteraan pekerja	Sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, monitoring & evaluasi, penegakan sanksi hukum	Dinperinaker	12 bulan

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYEL ESAIAN
		Risiko Pemangku Kepentingan: Ketidakpercayaan sektor swasta untuk berinvestasi dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memasuki dunia	RSO.26.07.11.03	16	- Kurangnya dukungan dari Pemda dalam kemudahan berinvestasi - Iklim ketenagakerjaan yang tidak kondusif - Kesejahteraan pekerja kurang	- Kesempatan kerja rendah - Banyak angkatan kerja yang tidak masuk pasar kerja - Budaya protektif terhadap anak	Mendorong peningkatan kompetensi ASN, Bekerjasama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam mendorong iklim kemudahan investasi dan birokrasi yang bersih	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Kecurangan: Pemalsuan atau fabrikasi data	RSO.26.07.11.04	16	Angka TPAK menjadi tidak akurat	kebijakan ketenagakerjaan salah sasaran, alokasi anggaran tidak efektif	Sistem verifikasi data, digitalisasi terintegrasi, audit data berkala	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Operasional: Sistem yang dibangun tidak berjalan	RSO.26.07.11.05	19	Tidak semua pencari kerja dan pemberi kerja memanfaatkan sistem informasi yang ada	Terdapat gap informasi sehingga lowongan kerja tidak dapat diakses, supply tidak terpenuhi	Penyederhaan sistem informasi ketenagakerjaan, penyebarluasan dan edukasi	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Bencana: Turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja	RSO.26.07.11.06	16	apabila terjadi krisis ekonomi, peperangan dan kondisi kebencanaan yang force majeure	Jumlah pengangguran meningkat Penurunnya produktifitas, peningkatan kemiskinan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi	Pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan pelatihan kerja	Dinperinaker	12 bulan

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYEL ESAIAN
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Risiko Kebijakan: Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 yang berfokus pada industri prioritas daerah membuat sektor industri non prioritas menjadi tidak tersentuh	RSO.26.07.11.07	16	1. Tidak ada pembangunan dan pengembangan industri baru dan existing 2. Sektor industri non prioritas menjadi tidak tersentuh 3. Belum ada perbub tentang pedoman teknis rencana pembangunan industri	Nilai investasi dan proses produksi industri tidak mencapai target	Meninjau kembali kebijakan dan menyusun rencana pengembangan industri non-prioritas	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Kepatuhan: Ketidakpatuhan terhadap Strategi dan Program Rencana Pembangunan Industri	RSO.26.07.11.08	16	Belum semua pemangku kepentingan terkait memahami strategi dan program Rencana Pembangunan Industri	Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program	Fasilitasi akses peralatan dan pelatihan teknologi tepat guna	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Pemangku Kepentingan: Kurangnya komitmen dunia usaha dalam industri	RSO.26.07.11.09	16	Kebijakan yang tidak konsisten dan sering berubah	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berkurang	Fasilitasi kemitraan IKM	Dinperinaker	12 bulan

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYEL ESAIAN
		Risiko Kecurangan: Plot anggaran yang tidak tepat sasaran	RSO.26.07.11.10	16	1. Adanya celah dalam plotting anggaran 2. Kurangnya keterbukaan informasi publik	1. Pelaksanaan program Rencana Pembangunan Industri tidak berjalan optimal 2. Program tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu	Sosialisasi dan inspeksi berkala IKM untuk perizinan	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Operasional: Terbatasnya infrastruktur industri	RSO.26.07.11.11	16	Industri yang belum merata	Investor enggan masuk	Perbaikan infrastruktur	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Bencana: Krisis energi dan bahan baku	RSO.26.07.11.12	16	Fluktuasi harga bahan baku	Daya saing industri turun	Hilirisasi bahan baku lokal	Dinperinaker	12 bulan
Sasaran : 1. Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Risiko Kebijakan : Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	RSO.26.07.11.13	16	Kurang optimalnya penargetan sasaran program dan lemahnya mekanisme pendampingan	Rendahnya kepesertaan BPJS dan risiko ketenagakerjaan meningkat	pembinaan bagi perusahaan yang masih PDS Upah dan PDS pekerja/buruh	Dinperinaker	12 bulan

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYEL ESAIAN
		Risiko Kepatuhan : Kurangnya kesadaran perusahaan atas pentingnya kesejahteraan dan keselamatan Pekerja	RSO.26.07.11.14	16	Belum semua Pengusaha sadar akan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan Pekerja yang pada akhirnya kan berdampak pada kinerja Pekerja	Minimnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja	pembinaan dan sosialisasi	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Pemangku Kepentingan : Adanya regulasi dari BPJS TK bahwa tidak semua perusahaan tidak mewajibkan mengikuti pekerjaanya dalam 4 program	RSO.26.07.11.15	19	Program Kepesertaan dilihat dari status dan kriteria industri	Tidak semua pekerja tercover dalam 4 program BPJS TK	Asistensi ketika penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Kecurangan : Pekerja dirugikan dengan kepesertaan yang tidak sesuai	RSO.26.07.11.16	16	Pekerja cuma didaftarkan beberapa program saja	Risiko tidak terlindungi saat kecelakaan atau PHK	pembinaan bagi perusahaan yang masih PDS Upah dan PDS pekerja/buruh	Dinperinaker	12 bulan

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYEL ESAIAN
		Risiko Operasional : banyaknya industri kecil menengah dibanding industri besar	RSO.26.07.11.17	19	adanya kemudahan berusaha untuk industri kecil dan menengah	banyaknya pekerja yang belum tercover ke program BPJS TK	Membuat regulasi berbasis kearifan lokal	Dinperinaker	12 bulan
2. Meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Risiko Kebijakan: masih banyak IKM yang belum tersentuh untuk dilakukan pembinaan	RSO.31.07.11.18	19	Kebijakan tentang anggaran yang sudah ada namun sangat minim	pertumbuhan IKM lambat	optimalisasi dalam pembinaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Kepatuhan: IKM dapat melanggar peraturan	RSO.31.07.11.19	16	IKM seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait perizinan maupun standar produk.	IKM tidak bisa mengembangkan usahanya	optimalisasi dalam pembinaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Pemangku Kepentingan: Kepatuhan IKM terhadap regulasi yang berlaku	RSO.31.07.11.20	16	Rendahnya pengetahuan IKM terkait perizinan	IKM yang berizin belum maksimal	Fasilitasi perizinan IKM	Dinperinaker	12 bulan

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYEL ESAIAN
		Risiko Kecurangan: Konsumen dirugikan dengan adanya produk yang tidak sesuai standar mutu di pasaran	RSO.31.07.11.21	16	IKM sengaja atau kurang faham tentang standar mutu produk	IKM akan mendapat sanksi administrasi dan hukum	mempertemukan IKM dengan perbankan untuk mendapatkan modal usaha	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Operasional: SDM dan Keterampilan rendah	RSO.31.07.11.22	16	Minimnya pelatihan bagi IKM	prosentase IKM aktif menurun	Pelatihan dan pendampingan usaha	Dinperinaker	12 bulan
		Risiko Bencana: Krisis bahan baku	RSO.31.07.11.23	16	Ketergantungan IKM pada bahan baku lokal	Kenaikan bahan baku sehingga produksi IKM turun	Diversifikasi bahan baku	Dinperinaker	12 bulan

Rencana Tindak Pengendalian Operasional

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISSIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan pencari kerja yang dilaksanakan								
			Sub Kegiatan :									
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Risiko Kebijakan: Pelatihan yang dilakukan belum mencerminkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja	ROO.2 6.07.1 1.01	16	perubahan regulasi pemerintah, ketidaksinkronan kebijakan, kebijakan internal lembaga yang tidak jelas, perubahan prioritas anggaran	penyesuaian pelatihan dengan regulasi yang baru dalam waktu singkat, pelaksanaan pelatihan yang tidak selaras dengan kebijakan pusat dan daerah,	Melakukan training needs analysis (TNA) secara rutin dengan melibatkan sektor industri, Melibatkan DU/DI sebagai mitra pelatihan , Merevisi kurikulum berbasis SKKNI dan KKNI, Meningkatkan	Din per naker	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
								pemerintah, kemudahan kebijakan tidak berdasarkan pada kebutuhan dunia kerja	pelatihan yang tidak sesuai standar yang berlaku, kompetensi pelatihan yang diajarkan tidak terserap oleh pasar.	kompetensi instruktur		
					Risiko Kepatuhan: Materi pelatihan yang tidak sesuai, instruktur yang tidak kompeten, waktu pelatihan yang kurang, metode pelatihan tidak relevan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dokumentasi administrasi yang tidak lengkap	ROO.2 6.07.1 1.02	16	perubahan regulasi nasional, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, kebijakan internal lembaga tidak sesuai SKKNI, kebijakan anggaran yang tidak stabil, kebijakan kurikulum yang tidak terintegrasi	penyesuaian sistem pelatihan dalam waktu singkat, pelatihan yang menyimpang dari SKKNI, pelaksanaan pelatihan yang tidak optimal	Lakukan review dan revisi kurikulum secara berkala, Lakukan pelatihan dan upskilling instruktur secara berkala, Terapkan sistem evaluasi kinerja instruktur oleh peserta dan manajemen, menggunakan metode berbasis praktik: project-based learning, case study, simulasi, dan magang, menganggarkan pembaruan peralatan secara bertahap sesuai prioritas.	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Pemangku Kepentingan: - Adanya regulasi yang dinamis, - Kurang optimalnya penerapan SKKNI di Lembaga Pelatihan - Ketidaksesuaian pelatihan di BLK dengan kebutuhan industri	ROO.2 6.07.1 1.03	16	- Perubahan dari regulasi yang sebelumnya - Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan	- Penyesuaian terhadap regulasi yang berubah - peserta pelatihan tidak terserap di industri	Koordinasi dengan Supra (Pemda, Pemprov, Pusat)	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Kecurangan: Pemalsuan sertifikasi kompetensi, rekayasa keadilan dan absensi peserta pelatihan, manipulasi nilai/ hasil, penyimpangan	ROO.2 6.07.1 1.04	16	Mendapatkan keuntungan pribadi, monitoring pelaksanaan pelatihan yang tidak berkesinambungan, sistem administrasi pelatihan yang masih manual,	kerugian keuangan, meningkatnya potensi pemalsuan dokumen, laporan fiktif, proses penilaian dan kualitas kelulusan yang tidak kredibilitas	Bentuk Tim Pengawasan dan Audit Internal Pelatihan, Terapkan pakta integritas bagi panitia, instruktur, dan peserta, lakukan whistleblowing system (saluran pelaporan pelanggaran), Susun	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUGJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					dana pelatihan, rekayasa dokumentasi pelatihan, dan penggunaan peralatan yang fiktif			praktik manipulatif dengan peserta pelatihan, pedoman etika bagi staff dan instruktur ynag kurang		dan terapkan Kode Etik Pelaksanaan Pelatihan		
					Risiko Operasional:Terjadinya kecelakaan kerja saat pelatihan	ROO.2 6.07.1 1.05	16	Pelanggaran terhadap SOP K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja)	Tidak bisa menyelesaikan pelatihan secara penuh	Sosialisasi dan sarana K3 lebih ditingkatkan	Din perina ker	12 bulan
					Risiko Bencana: Tempat pelatihan yang tidak representatif	ROO.2 6.07.1 1.06	16	Prasarana gedung yang tidak memadai	Terganggunya proses pelatihan	Pengecekan kembali kelayakan tempat pelatihan	Din perina ker	12 bulan
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina								
			Sub Kegiatan :									

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PELANGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Risiko Kebijakan : Kemungkinan terhambatnya pelaksanaan pembinaan akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat/daerah yang tidak sinkron dengan program daerah.	ROO.2 6.07.1 1.07	16	Perubahan kebijakan pemerintah pusat/daerah yang tidak terduga	Ketidaksesuaian program pembinaan dengan arah kebijakan baru	Rutin mengikuti perkembangan kebijakan, menjalin komunikasi aktif dengan instansi pembina	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Kepatuhan : Kemungkinan kegiatan pembinaan tidak efektif akibat LPK tidak memenuhi standar teknis dan administratif yang ditetapkan.	ROO.2 6.07.1 1.08	16	LPK tidak memenuhi standar teknis/administratif yang ditetapkan	Hambatan dalam proses pembinaan dan pelaporan	Sosialisasi regulasi secara berkala, monitoring dan evaluasi rutin	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Pemangku Kepentingan: Rendahnya minat/partisipasi LPK untuk mengikuti pembinaan	ROO.2 6.07.1 1.09	16	Kurangnya manfaat langsung yang dirasakan, jadwal pelatihan tidak sesuai	LPK tidak terlibat → jumlah peserta binaan berkurang	- Survei kebutuhan LPK - Penyesuaian materi & jadwal - Insentif non-finansial (sertifikat, rekomendasi)	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Kecurangan : Kemungkinan manipulasi data jumlah atau kualitas LPK yang dibina sehingga laporan tidak mencerminkan kondisi riil.	ROO.2 6.07.1 1.10	16	Manipulasi data jumlah atau kualitas LPK yang dibina	Laporan output tidak sesuai realita, merusak integritas program	Audit internal, pencocokan data lapangan, penggunaan sistem berbasis digital	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Operasional : Terbatasnya SDM dan anggaran untuk membina LPK sesuai target	ROO.2 6.07.1 1.11	16	Jumlah petugas pembina terbatas, anggaran terbagi	Kualitas pembinaan rendah, target kuantitas tidak tercapai	Prioritaskan LPK strategis - Optimalisasi anggaran	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Bencana: Gangguan pembinaan akibat bencana	ROO.2 6.07.1 1.12	16	Lokasi terdampak bencana, pembinaan tatap muka terganggu	Pembinaan tertunda, target LPK berkurang	Rencana kontinjensi darurat - Penjadwalan ulang fleksibel	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					alam/force majeure (banjir, gempa, pandemi)							
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota									
			Sub Kegiatan :									
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Risiko Kebijakan : Penempatan pencari kerja terkendala	ROO.2 6.07.1 1.13	16	Perubahan regulasi pusat atau daerah yang memengaruhi prosedur penempatan kerja	Target penempatan tidak tercapai	Konsultasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi	Din perina ker	12 bulan
					Risiko Kepatuhan : Penempatan tenaga kerja unprosedural	ROO.2 6.07.1 1.14	16	Kesalahan pelaksanaan teknis, penempatan tidak sesuai prosedur, atau penggunaan TKA tanpa izin	Penurunan kepercayaan publik dan potensi tuntutan hukum	SOP penempatan diperbarui, pelatihan teknis rutin petugas	Din perina ker	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISSIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PE NANG GU NG JA WA B	TARG ET WAK TU PENY ELES AIAN
					Risiko Operasional : Tuntutan Hukum atas kebijakan atau peristiwa penempatan yang tidak sesuai prosedur	ROO.2 6.07.1 1.15	16	Bila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pembinaan maupun penempatan, bila terdapat kasus penempatan yang unprosedural, penempatan kerja tidak sesuai, Penggunaan TKA yang tidak sesuai atau adanya overstay dan penyalahgunaan ijin	Turunnya kepercayaan publik, pengenaan penetapan putusan hukum	Audit reguler & kerja sama bantuan hukum	Din peri nak er	6 bulan
					Risiko Fraud: Resiko korupsi dari penyelenggara layanan	ROO.2 6.07.1 1.16	16	Apabila terjadi korupsi dalam proses penyelenggaraan layanan	Turunnya kepercayaan publik, pengenaan penetapan putusan hukum	Pembentukan Satgas Internal & kanal aduan pelanggaran	Din peri nak er	3 bulan
					Risiko Pemangku Kepentingan: Tingkat kepercayaan masyarakat	ROO.2 6.07.1 1.17	16	Apabila pegawai di Dinperinaker terbukti melakukan tindak korupsi, INformasi atau	Turunnya kepercayaan publik, pengenaan penetapan putusan hukum	Peningkatan pelayanan publik & pelatihan etika pelayanan	Din peri nak er	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					pada layanan Dinperinaker berkurang			layanan yang diberikan dinas tidak sesuai				
					Risiko Bencana : Gangguan layanan akibat bencana alam	ROO.2 6.07.1 1.18	13	Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sarana prasarana, hilangnya data, atau terhambatnya layanan antar kerja	Layanan penempatan tenaga kerja terganggu, data pencari kerja hilang, target penempatan tidak tercapai	Penyusunan rencana kontinjensi, backup data digital berkala di cloud koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait untuk mitigasi dan tanggap darurat	Dinperinaker	3 bulan
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Risiko Kebijakan: Pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, Pemerintah tidak mampu membendung arus informasi penempatan kerja yang menyesatkan,	ROO.2 6.07.1 1.19	16	Apabila Dinperinaker belum memiliki kebijakan terkait penyuluhan dan bimbingan jabatan dan stategi dalam membentung arus informasi yang menyesatkan di masyarakat	Masyarakat menjadi rentan terhadap penipuan, salah informasi, dan eksploitasi dalam proses penempatan kerja, yang berujung pada meningkatnya kerugian sosial, ekonomi, serta menurunnya	Penyusunan SOP informasi jabatan dan kerja sama dengan lembaga kredibel	Dinperinaker	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh janji-janji palsu tanpa perlindungan yang memadai.				kepercayaan terhadap lembaga resmi			
					Risiko Kepatuhan : Materi penyuluhan dan bimbingan jabatan tidak sesuai standar	ROO.2 6.07.1 1.20	16	Kompetensi pemberi Penyuluhan dan bimbingan Jabatan belum sesuai,,Dinas belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan deteksi dini, klarifikasi, dan penanggulangan berita hoaks yang semakin masif di berbagai platform	Masyarakat menjadi rentan terhadap penipuan, salah informasi, dan eksploitasi dalam proses penempatan kerja, yang berujung pada meningkatnya kerugian sosial, ekonomi, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga resmi	Pelatihan petugas dan distribusi modul penyuluhan	Dinaker	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Pemangku Kepentingan :Sekolah dan masyarakat desa tidak ingin bekerjasama dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan	ROO.2 6.07.1 1.21	16	SDM yang kurang kompeten, keterbatasan dalam mengatasi pemberitaan ketenagakerjaan yang hoax melalui media sosial	Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada OPD	Sosialisasi masif dan MoU dengan sekolah/desa	Din perina ker	6 bulan
					Risiko Kecurangan: Korupsi dalam waktu pemberian penyuluhan dan bimbingan jabatan	ROO.2 6.07.1 1.22	16	pengawasan internal tidak berjalan, integritas petugas rendah	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Supervisi rutin dan transparansi kegiatan	Din perina ker	3 bulan
					Risiko Operasional : Munculnya tuntutan hukum	ROO.2 6.07.1 1.23	16	Salah dalam penyampain informasi, maraknya informasi penempatan yang hoaks yang belum terklarifikasi	Penempatan unprosedural, pencari kerja kesulitan mendapatkan iformasi untuk mendapatkan pekerjaan	Verifikasi konten informasi sebelum disebar, pelatihan komunikasi publik, dan koordinasi dengan lembaga resmi	Din perina ker	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISSIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Bencana: Adanya kecelakaan kerja menuju lokasi yang sulit diakses	ROO.2 6.07.1 1.24	16	Lokasi yang sulit diakses, keterbatasan sarana transportasi yang memadai	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan tidak dapat dilaksanakan		Din perina ker	12 bulan
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Risiko Kebijakan : Ekosistem inklusi tidak tercapai	ROO.2 6.07.1 1.25	19	Masih ada kesenjangan perlakuan pada disabilitas, kesempatan kerja bagi disabilitas rendah, belum ada kebijakan yang progresif untuk mendorong inklusi bidang ketenagakerjaan bagi disabilitas	Ekosistem inklusi tidak tercapai, kesulitan mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas		Din perina ker	
					Risiko Kepatuhan : penemuan kesempatan kerja sesuai UU no 8 tahun 2016 belum terlaksana secara optimal	ROO.2 6.07.1 1.26	16	kesempatan kerja bagi disabilitas masih rendah, kualifikasi yang dimiliki pencari disabilitas masih rendah, tingkat kepatuhan untuk memenuhi aturan masih rendah	pencaker disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan, perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi	Sosialisasi kewajiban kuota perusahaan & pengawasan berkala	Din perina ker	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Pemangku Kepentingan: - Tingkat kepercayaan masyarakat pada Unit Layanan Disabilitas Dinperinaker berkurang - Perusahaan tidak memiliki komitmen menyediakan kuota lowongan untuk pencari kerja disabilitas	ROO.2 6.07.1 1.27	19	- Apabila pelayanan terhadap pencari kerja disabilitas terjadi diskriminasi - Pemerintah tidak bisa melaksanakan amanat UU No 8 Tahun 2016	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Penetapan SOP dan peningkatan kualitas layanan ULD	Din perinaker	6 bulan
					Risiko Kecurangan : Resiko korupsi dalam penyelenggaraan layanan	ROO.2 6.07.1 1.28	16	Apabila terjadi korupsi dalam proses penyelenggaraan layanan	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Audit anggaran berkala dan pembentukan tim pengawas internal	Din perinaker	3 bulan
					Risiko Operasional : Perusahaan membatasi akses penempatan	ROO.2 6.07.1 1.29	16	Kekhawatiran perusahaan untuk menerima tenaga kerja disabilitas baik dari segi biaya	Penempatan pencari kerja disabilitas menurun dikarenakan sangat	Pelatihan petugas dan asesmen kepuasan penerima layanan	Din perinaker	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PELANGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					tenaga kerja disabilitas			penyediaan akses maupun komunikasi dengan tenaga kerja disabilitas	terbatasnya lowongan kerja bagi penyandang disabilitas			
					Risiko Bencana : Konflik yang timbul dari stigma masyarakat (diskriminasi, miskomunikasi)	ROO.2 6.07.1 1.30	16	Tidak semua mampu memahami serta berkomunikasi dengan tenaga kerja disabilitas sesuai ragam disabilitas dan budaya inklusi belum kuat	Rendahnya pemahaman masyarakat maupun dunia kerja terhadap penerimaan sosial tenaga kerja disabilitas		Din peri nak er	12 bulan
											Din peri nak er	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Risiko Kebijakan : kesempatan kerja terbatas , pengangguran meningkat	ROO.2 6.07.1 1.31	16	belum memiliki kebijakan, program dan strategi dalam mendorong perluasan kesempatan kerja	kesempatan kerja terbatas , pengangguran meningkat	Penyusunan roadmap & program intervensi daerah berbasis potensi lokal	Din peri nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISSIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PELANGUANG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Kepatuhan : pelaksanaan program tidak sesuai aturan atau sasaran program belum tepat	ROO.2 6.07.1 1.32	16	identifikasi sasaran program tidak berjalan sesuai aturan, penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program, pelaksanaan program tidak memperhatikan kebutuhan pasar kerja	Program tidak berjalan sesuai yang diharapkan, output dan outcome program tidak tercapai	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi terpadu	Din perina ker	6 bulan
					Risiko Operasional : Tuntutan hukum akibat pelaksanaan program yang tidak sesuai aturan	ROO.2 6.07.1 1.33	16	Pelaksanaan program tidak sesuai dengan aturan sehingga penerima layanan dirugikan	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun, pengenaan keputusan hukum	Penyesuaian SOP program & pelatihan pelaksana lapangan	Din perina ker	6 bulan
					Risiko Kecurangan: Resiko korupsi dalam penyelenggaraa n layanan	ROO.2 6.07.1 1.34	16	korupsi dalam pelaksanaan program	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Audit internal berkala dan transparansi laporan	Din perina ker	3 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PELANGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Pemangku Kepentingan : Tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan program perluasan kesempatan kerja Dinperinaker berkurang	ROO.2 6.07.1 1.35	16	Pelaksanaan program tidak berpedoman pada aturan yang berlaku	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Diseminasi informasi dan promosi program perluasan kerja	Din perinaker	6 bulan
					Risiko Bencana : Gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan kerja akibat bencana alam	ROO.2 6.07.1 1.36	13	Terjadinya bencana alam yang menghambat mobilitas peserta atau merusak sarana produksi kelompok usaha kerja	Kegiatan pemberdayaan tertunda, hasil produksi terganggu, peserta kehilangan alat kerja	Penyusunan rencana kontinjensi (mitigasi & pemulihan), backup data dan dokumen kegiatan, koordinasi dengan BPBD dan dinas teknis untuk penanganan cepat	Din perinaker	12 bulan
			Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota									

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Risiko Kebijakan : PMI bermasalah, Penipuan penempatan	ROO.2 6.07.1 1.37	16	penegakan kebijakan penempatan luar negeri belum maksimal, Pemerintah tidak mampu membendung arus informasi penempatan kerja yang menyesatkan, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh janji-janji palsu tanpa perlindungan yang memadai.	PMI bermasalah, Penipuan penempatan	Penguatan regulasi dan publikasi resmi penempatan luar negeri	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Kepatuhan : kepatuhan untuk menjalani prosedur penempatan sesuai aturan pemerintah rendah	ROO.2 6.07.1 1.38	16	penempatan luar negeri merupakan ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan	PMI bermasalah, Penipuan penempatan	Koordinasi pengawasan lintas sektor & pelatihan petugas	Din per nak er	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUGJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
								penempatan luar negeri rendah,				
					Risiko Operasional : Tuntutan hukum akibat pelaksanaan program yang tidak sesuai aturan	ROO.2 6.07.1 1.39	16	Pelaksanaan program tidak sesuai dengan aturan sehingga penerima layanan dirugikan	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun, pengenaan keputusan hukum	Penyesuaian SOP program & pelatihan pelaksana lapangan	Din perina ker	6 bulan
					Risiko Kecurangan: Resiko korupsi dalam penyelenggaraa n layanan	ROO.2 6.07.1 1.40	16	korupsi dalam pelaksanaan program	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Audit internal berkala dan transparansi laporan	Din perina ker	3 bulan
					Risiko Pemangku Kepentingan : Tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan program perluasan	ROO.2 6.07.1 1.41	16	Pelaksanaan program tidak berpedoman pada aturan yang berlaku	Tingkat kepercayaan masyarakat pada dinas menurun	Diseminasi informasi dan promosi program perluasan kerja	Din perina ker	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGUNJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					kesempatan kerja Dinperinaker berkurang							
					Risiko Bencana : Gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan kerja akibat bencana alam	ROO.2 6.07.1 1.42	13	Terjadinya bencana alam yang menghambat mobilitas peserta atau merusak sarana produksi kelompok usaha kerja	Kegiatan pemberdayaan tertunda, hasil produksi terganggu, peserta kehilangan alat kerja	Penyusunan rencana kontinjensi (mitigasi & pemulihan), backup data dan dokumen kegiatan, koordinasi dengan BPBD dan dinas teknis untuk penanganan cepat	Dinperinaker	12 bulan
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
			Sub Kegiatan :									

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PELANGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Risiko Kebijakan : diterbitkannya PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah	ROO.2 6.07.1 1.43	16	untuk memberikan kemudahan bagi usaha-usaha mikro dalam mengurus NIB	tidak memberikan perlakuan yang sama kepada perusahaan menengah besar dalam hal upah dan kepesertaan BPJS TK	membuat perda tentang klasifikasi perusahaan mikro kecil menengah besar	Din perina ker	12 bulan
					Risiko Kepatuhan : banyak bertumbuhnya usaha pengolahan kayu yang pada NIB nya muncul klasifikasi mikro sehingga tidak diwajibkan memberikan upah sesuai dengan UMK dan kepesertaan BPJS TK	ROO.2 6.07.1 1.44	16	diberikan payung hukum untuk membayarkan upah pekerja/buruh tidak sesuai UMK, melainkan berdasarkan kesepakatan	perusahaan menengah besar menuntut hak yang sama dengan usaha mikro dalam hal pembayaran upah pekerja/buruh dan kepesertaan BPJS TK	membuat perda tentang klasifikasi perusahaan mikro kecil menengah besar	Din perina ker	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					diperbolehkan hanya 2 program							
					Risiko Pemangku Kepentingan : Tuntutan serikat pekerja atau asosiasi pengusaha terhadap penerapan kebijakan baru yang dianggap merugikan salah satu pihak.	ROO.2 6.07.1 1.45	16	regulasi yang ada telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus NIB dengan kriteria mikro	bahan baku yang digunakan sama antara usaha mikro dan perusahaan menengah besar namun berbeda dalam upah dan kepesertaan BPJS TK mengakibatkan perusahaan menengah besar kesulitan mendapatkan bahan baku karena harga yang tinggi	membuat perda tentang klasifikasi perusahaan mikro kecil menengah besar	Dinaker	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISSIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Kecurangan : pengusaha pada usaha mikro dalam menjalankan perusahaan dengan biaya operasional yang murah	ROO.2 6.07.1 1.46	16	oleh regulasi dikecualikan membayar upah sesuai UMK	perusahaan menengah besar melakukan perubahan waktu kerja dan penggunaan pola pekerja/buruh libur masuk bergantian	membuat perda tentang klasifikasi perusahaan mikro kecil menengah besar	Din perina ker	12 bulan
					Risiko Operasional : pembinaan norma ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan secara maksimal	ROO.2 6.07.1 1.47	16	regulasi sudah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro	semakin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya sebagai usaha mikro dalam NIB	membuat perda tentang klasifikasi perusahaan mikro kecil menengah besar	Din perina ker	12 bulan
					Risiko Bencana: Terjadinya bencana alam yang mengganggu aktivitas perusahaan dan hubungan kerja.	ROO.2 6.07.1 1.48	12	Lokasi perusahaan terdampak bencana dan tidak memiliki rencana kontinjensi	Terhentinya produksi, PHK massal, dan meningkatnya pengaduan hubungan industrial	Menyusun protokol tanggap darurat hubungan industrial pascabencana serta memberikan pendampingan kepada perusahaan terdampak.	Din perina ker	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
			Sub Kegiatan :									
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Risiko Kebijakan : Keberlangsungan program dan kegiatan Dekranas dalam jangka panjang.	ROO.3 1.31.1 1.49	16	Perubahan regulasi pemerintah, perubahan prioritas anggaran pemerintah	Kegiatan pembinaan IKM kerajinan tidak sesuai dengan yang diharapkan	Penyusunan regulasi turunan, pemetaan kegiatan prioritas daerah	Din perina ker	12 bulan
					Risiko Kepatuhan : Ketidak pastian yang berdampak pada IKM Pengrajin akibat kegagalan memenuhi peraturan atau undang undang yang berlaku	ROO.3 1.31.1 1.50	16	identifikasi sasaran program tidak berjalan sesuai aturan, penyalahgunaan wewenang	Program tidak berjalan sesuai yang diharapkan, output dan outcome program tidak tercapai	Penguatan koordinasi lintas bidang dan updating panduan teknis	Din perina ker	6 bulan
					Risiko Pemangku Kepentingan :	ROO.3 1.31.1 1.51	16	rendahnya minta bergabung	jumlah IKM kerajinan tidak	Sosialisasi manfaat bergabung dekranasda	Din peri	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					partisipasi IKM rendah			dengan dekranasda	bertambah signifikan		nak er	
					Risiko Kecurangan : Penyelewengan dana kegiatan promosi atau pelatihan	ROO.3 1.31.1 1.52	16	kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran	Program tidak berjalan sesuai yang diharapkan, output dan outcome program tidak tercapai	publikasi realisasi anggaran	Din per nak er	3 bulan
					Risiko Operasional : SDM pengrajin terbatas	ROO.3 1.31.1 1.53	16	Minim pelatihan dan regenerasi	kualitas produk rendah dan sulit bersaing	Pelatihan dan regenerasi pengrajin muda	Din per nak er	6 bulan
					Risiko Bencana : Akses pasar terbatas untuk produk kerajinan	ROO.3 1.31.1 1.54	16	keterbatasan digitalisasi pemasaran	produk sulit dikenal luas	pameran dan bazar daerah/nasional	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISSIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Risiko Kebijakan : Perubahan Kebijakan Pemerintah	ROO.3 1.31.1 1.55	16	Kebijakan pemerintah terkait tembakau sangat dinamis, termasuk pajak, regulasi iklan, dan pembatasan produk	Keberlangsungan operasional APHT	Sinkronisasi lintas sektor & advokasi kebijakan daerah	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Kepatuhan : Potensi kurang maksimalnya pemanfaatan APHT	ROO.3 1.31.1 1.56	16	Tidak ada pelaku industri tembakau yang menempati APHT	Pembangunan APHT tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi	Sosialisasi masif	Din per nak er	6 bulan
					Risiko Pemangku Kepentingan : Partisipasi IKM rendah	ROO.3 1.31.1 1.57	16	Kurangnya kesadaran manfaat APHT	Program pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal	Penyusunan SOP pertanggungjawaban dan pelatihan staf	Din per nak er	6 bulan
					Risiko Kecurangan : Risiko penyalahgunaan penggunaan anggaran	ROO.3 1.31.1 1.58	16	Kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran anti korupsi	Output kegiatan tidak sesuai target yang ditetapkan	Penguatan pengawasan internal dan audit rutin	Din per nak er	3 bulan
					Risiko Operasional :	ROO.3 1.31.1 1.59	16	Kurangnya pelatihan teknis	pembangunan industri lambat	Pelatihan teknis	Din peri	6 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGUNJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Kualitas SDM rendah						nak er	
					Risiko Bencana : Krisis bahan baku	ROO.3 1.31.1 1.60	16	Ketergantungan IKM pada bahan baku lokal	Kenaikan bahan baku sehingga produksi IKM turun	Diversifikasi bahan baku	Din per nak er	12 bulan
											Din per nak er	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Risiko Kebijakan : Ketergantungan yang besar kepada dukungan pemerintah dapat membuat pelaku ekraf rentan terhadap perubahan kebijakan	ROO.3 1.31.1 1.61	16	Kurangnya infrastruktur pendukung seperti fasilitas produksi, jaringan pemasaran dan sistem distribusi	Menghambat perkembangan Ekraf	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung ekraf (produksi, jaringan, distribusi) melalui koordinasi lintas sektor	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Kepatuhan : Ketidak pastian yang berdampak pada sasaran ekonomi kreatif akibat kegagalan	ROO.3 1.31.1 1.62	16	Kurangnya pengetahuan tentang regulasi	Kegagalan mematuhi peraturan dapat menyebabkan sanksi hukum, seperti denda atau penutupan usaha	Sosialisasi dan pelatihan regulasi kepada pelaku ekonomi kreatif	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					memenuhi peraturan atau undang undang yang berlaku							
					Risiko Pemangku Kepentingan: Koordinasi dan lintas sektor lemah	ROO.3 1.31.1 1.63	16	belum ada forum koordinasi rutin	duplikasi kegiatan	koordinasi lintas sektor secara rutin	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Kecurangan : Risiko penyalahgunaan penggunaan anggaran	ROO.3 1.31.1 1.64	16	Kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran anti korupsi	Program tidak berjalan sesuai yang diharapkan, output dan outcome program tidak tercapai	Peningkatan kapasitas SDM pengawas, serta internalisasi budaya anti korupsi	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Operasional: keterbatasan SDM IKM	ROO.3 1.31.1 1.65	16	kurangnya pelatihan	produk industri tidak kompetitif	pelatihan berjenjang kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Bencana: Akses pasar terbatas untuk produk kerajinan	ROO.3 1.31.1 1.66	13	keterbatasan digitalisasi pemasaran	produk sulit dikenal luas	pameran dan bazar daerah/nasional	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Sub Kegiatan :									
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Risiko Kebijakan : Permenperin 13 Tahun 2025 mengatur tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lainnya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) belum menerapkan	ROO.3 1.31.1 1.67	16	Belum diterapkannya sanksi bagi pelaku industri yang tidak menyampaikan laporan	Pemerintah tidak memperoleh data industri sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan	Sosialisasi kewajiban pelaku industri dalam penyampaian data industri	Din per naker	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUJAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					adanya sanksi bagi pelaku industri yang tidak menyampaikan laporan							
					Risiko Kepatuhan : Pelaku industri tidak melaksanakan kewajiban kepemilikan akun SIINas dan kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas	ROO.3 1.31.1 1.68	16	Kurangnya pengetahuan pelaku industri tentang kewajiban kepemilikan akun SIINas dan kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas	- Pemerintah tidak memperoleh data industri sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan - Pelaku industri tidak dapat memanfaatkan layanan fasilitas dari SIINas	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran akun, pengisian data dan pelaporan data industri di SIINas	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Pemangku Kepentingan : kepatuhan Pelaku industri rendah	ROO.3 1.31.1 1.69	16	kurangnya pemahaman pentingnya SIINAS	data industri tidak lengkap	Sosialisasi dan pendampingan teknis SIINAS	Din per nak er	12 bulan
					Risiko Fraud : Ketidaktepatan pengambilan kebijakan	ROO.3 1.31.1 1.70	16	Pengambilan kebijakan tidak berdasarkan data	Kebijakan tidak tepat sasaran	Analisis pengolahan data industri	Din per nak er	12 bulan

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISKI	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					Risiko Operasional: Infrastruktur TI terbatas	ROO.3 1.31.1 1.71	16	Akses di daerah terpencil sulit	data terlambat masuk	Peningkatan jaringan internet dan kerjasama dengan Dinkominfo	Din perina ker	12 bulan
0					Risiko Bencana: gangguan server baik daerah/nasional	ROO.3 1.31.1 1.72	13	server pusat down	data tidak bisa diakses	Koordinasi dengan kemenperin	Din perina ker	12 bulan